



PARLEMENTARIA

Soroti Opini WTP



FRAKSI-Fraksi di DPRD Kalbar menyoroti dan meminta masukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 yang mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian.

"Walaupun Pemprov Kalbar meraih opini WTP dari BPK,

◆ *Ke Halaman 15 kolom 5*

Soroti Opini WTP

Sambungan dari halaman 16

bukan berarti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2012 sudah sempurna dan tidak perlu dibahas secara detail lagi. Sehingga penyampaian yang diberikan sekadar formalitas, demikian juga dengan rapat-rapat pembahasan nantinya. Justru hemat kami, di sinilah kita dapat melakukan pembahasan secara detail dan lebih mendalam terhadap temuan awal dari BPK, temuan awal dari BPKP dan inspektorat," ungkap Retno Pramudya, juru bicara Fraksi PPP Kalbar, Rabu (24/7) saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP Kalbar.

Menurut dia, opini WTP oleh

BPK RI dapat dijadikan pelajaran, catatan dan bahan untuk perbaikan ke depan. Maka dari itu, Fraksi PPP berharap rapat-rapat pembahasan nantinya lebih intensif dan lebih mendalam terhadap pos-pos laporan realisasi anggaran juga catatan atas laporan keuangan. "Laporan keuangan sudah melalui proses akuntansi. Hemat kami adalah proses penjurnalan transaksi, posting ke buku, penyusunan neraca saldo, jurnal hingga penyusunan laporan. Saya yakin pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi yang diterapkan sebagaimana diatur dalam PP nomor 24 tahun 2005," ujarnya.

Fraksi Golongan Karya Kalimantan Barat melalui juru

bicara Andry Hudaya Wijaya mengakui patut berbangga hasil audit BPK terhadap APBD Kalbar tahun 2012, dapat kategori wajar tanpa pengecualian. Fraksi partai Golkar dalam hal ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalbar dan seluruh jajarannya sehingga mampu meraih predikat tersebut.

Syarif Izzhar Assury juru bicara Fraksi PAN Kalbar secara garis besar menuturkan opini WTP yang diberikan BPK RI Kalbar hendaknya harus menjadi kajian bersama-sama, terutama anggaran apa saja yang patut didukung. Sehingga kedepan LHP kedepannya, pemerintah provinsi mampu mempertahankan. (*den*)